



Thursday, 16 June 2016

**Mark Up Bank Maluku**

## **Alasan Sakit, Heintje Mangkir**



**Ambon** - Bos CV Harves, Heintje Abraham Toisuta mangkir dari panggilan jaksa, Selasa (14/6).

Semula Heintje akan dicecar sebagai tersangka korupsi dan TPPU pembelian lahan gedung Bank Maluku di Surabaya, Senin (13/6). Namun karena agenda kejaksaan sangat padat karena ada pertemuan dengan Pansus DPRD Maluku serta pemeriksaan sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga jaksa menunda pemeriksaan ke Selasa (14/6).

Walau begitu, pemeriksaan kembali ditunda akibat Heintje mangkir dengan alasan sakit.

Kasi Penyidikan Kejati Maluku Ledrik Takendengan melalui Kasi Penkum dan Humas Samy Sapulette menjelaskan, pemeriksaan terhadap Heintje akan dilakukan setelah kondisinya membaik.

Menurutnya, penyidik telah berkoordinasi dan langsung mengecek keberadaan Heintje di Rutan Polda Maluku guna memastikan kondisi yang bersangkutan.

“Sesuai agenda memang benar seharusnya Heintje diperiksa Selasa (14/6) tetapi tersangka sakit. Penyidik sudah langsung ke Rutan untuk mengecek kondisinya dan benar sakit. Kita akan koordinasikan lagi dan mengecek kondisi tersangka Rabu (15/6). Jika sudah membaik dan bisa menjalani pemeriksaan maka segera diperiksa,” ungkapnya.

### **Periksa Tersangka Lain**

Tak hanya Heintje, penyidik juga menggagendakan untuk memeriksa tersangka Dirut Bank Maluku-Malut Idris Rolobessy. “Direncanakan akan dilakukan pemeriksaan pula terhadap tersangka lain Idris Rolobessy. Kita akan koordinasikan dan akan melakukan pemeriksaan secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, sumber *Siwalima*, menyebutkan dari hasil pemeriksaan dua pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, telah memperkuat bukti yang sudah dikantongi jaksa sebelumnya.

“Hasil pemeriksaan OJK itu sejalan dengan temuan jaksa. Memperkuat bukti yang sudah ada. Alhasilnya OJK sangat mendukung agar segera menuntaskan kasus Bank Maluku,” kata sumber tersebut.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

Kendati tidak merincikan detail soal hasil penjelasan OJK. Namun sumber itu mengaku dari hasil pemeriksaan OJK tersebut maka semakin menambah bukti penyidikan terhadap kasus ini.

Saat diperiksa beberapa waktu lalu Heintje mengaku, ada uang Rp 2 milyar yang ia berikan kepada seseorang di Surabaya untuk bisnis. Namun anehnya, ia berdalih tidak mengenal orang itu.

Takendengan berharap, Heintje akan kooperatif. Jika ia terbuka kemungkinan tersangka akan bertambah. “Setelah pemeriksaan Toisuta maka kemungkinan besar muncul pihak-pihak yang akan bertanggung jawab lagi dalam kasus ini, tidak hanya tiga tersangka yang telah ditahan,” ujarnya.

Jaksa pun mengancam untuk menyita harta Heintje jika ia terus bungkam. “Sudah kita agendakan untuk pemeriksaan Toisuta. Kami harapkan bisa terbuka tetapi jika tidak ya harta kekayaannya pasti akan kita sita semua. Karena jumlah kerugian negara terlampau besar. Tinggal memilih saja,” tandas Takendengan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

Ancaman jaksa tak membuat pengacara Heintje gentar. Ia balik menantang jaksa. Jika harta Heintje disita, jaksa akan diproses hukum.

“Jangan pakai ancaman-ancaman begitu. Perlu diingat, untuk menyita harta seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak segampang itu, harus buktikan dulu harta mana yang masuk dalam kejahatan dan harus ada dasar hukumnya untuk menyita,” tandas Morits Latumeten, Pengacara Heintje kepada *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Sabtu (11/6).

Menurutnya, jaksa tidak bisa seenaknya main ancam untuk menyita harta Heintje dengan alasan ia tidak mau membuka mulut soal aliran uang pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Kalau tidak sesuai prosedur hukum, jaksa bisa disebut perampok.

Soal pengakuan Heintje ke penyidik yang menyebutkan ia memberikan uang Rp 2 milyar kepada seseorang untuk kepentingan bisnis, Latumeten mengatakan, tidak ada pengakuan Heintje seperti itu. Ia menuding Kasi Penyidikan, Ledrik Takendengan bermain opini.

“Ini kan tidak diakui. Dia sudah kasih Rp 54 M ke pemilik gedung kan selesai. Jangan langsung main ancam. Sangat disayangkan model kaya kasi penyidikan, jangan buat opini di media. Jangan dia buat opini terkait dengan perkara ini. Jalani apa adanya. Orang tidak melakukan kok harus mengaku. Jalani apa adanya saja,” ujar Latumeten.

Latumeten kembali mengingatkan Kejati Maluku untuk mematuhi prosedur hukum. Tidak perlu over action.

“Apa yang disampaikan Kasi Dik itu over action. Ada hukum dan aturannya kalau mau sita jalani dulu prosesnya. Kalau tidak ya kita lapor lagi bahwa jaksa rampok. Kami juga curiga ini, jangan-jangan ada apa-apanya ini,” tandas Latumeten. **(S-27)**